



## **WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- b. bahwa agar Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu adanya evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

- Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, adalah :
  - a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
  - b. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa adalah mengkaji dan menilai terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB II**  
**JENIS RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**YANG DIEVALUASI**

**Pasal 3**

- (1) Jenis Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa untuk dievaluasi, adalah :
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang pungutan;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang; dan
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD;

**BAB IV**  
**EVALUASI**

**Pasal 4**

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dievaluasi antara lain :

- a. sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan daerah dan kesesuaian kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Dana Transfer yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dievaluasi antara lain :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kesesuaian antara kewenangan Pemerintah Kota dan kewenangan Pemerintah Desa sehingga tidak terjadi pungutan ganda.

## **Pasal 6**

Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dievaluasi antara lain :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota;
- c. kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- d. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dievaluasi antara lain :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Pasal 8**

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar meneruskan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 9**

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diserahkan oleh Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Walikota.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa wajib memperbaikinya.

- (4) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Kepala desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Perbaikan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Pemerintah Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (9) Hasil perbaikan dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari.

## **BAB V KLARIFIKASI**

### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Uraian prosedur dan mekanisme Evaluasi Peraturan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 8



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 Mei 2015

TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mengamanatkan bahwa jenis Peraturan Desa antara lain Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh sekretaris desa dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Diatur lebih khusus dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sedangkan Peraturan Desa diluar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa tidak perlu dievaluasi.

Peraturan Desa dengan proses evaluasi dan tanpa proses evaluasi dari Walikota, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan untuk diklarifikasi.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Tujuan Peraturan Walikota tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**C. Tim Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi dan klarifikasi, Walikota membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa tentang APB Desa terdiri dari :

1. Walikota Banjar;
2. Wakil Walikota Banjar;
3. Sekretaris Daerah;
4. Asisten Daerah;
5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar;
7. Unsur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar;
8. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjar;
9. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar;
10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar;
11. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar; dan

12. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

**D. Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan selama paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa diterima.

**E. Pembiayaan**

Pembiayaan akibat pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa Peraturan desa dibebankan pada APBD Kota Banjar melalui DPA Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

**BAB II**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, PUNGUTAN, TATA RUANG DAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**A. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA**

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa meliputi :

- a. Evaluasi kesesuaian kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. Evaluasi kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Dana Transfer yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Evaluasi kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa terhadap Kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>   | <b>PELAKSANA</b>               | <b>WAKTU</b> |
|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 1.        | Pemeriksaan Kelengkapan RAPBDes   | Kantor PMPDKPOL                | 2 Hari Kerja |
| 2.        | Evaluasi kesesuaian kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa   | BAPPEDA Kota Banjar            | 4 Hari Kerja |
| 3.        | Evaluasi kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Dana Transfer yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Bagian TAPEM SETDA Kota Banjar | 2 Hari Kerja |
| 4.        | Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   | Bagian Hukum SETDA Kota Banjar | 3 Hari Kerja |
| 5.        | Evaluasi kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam Rancangan  | DPPKA Kota Banjar              | 5 Hari Kerja |

|    |   |  |              |
|----|---|--|--------------|
|    | Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |  |              |
| 6. | Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi              | Kantor PMPDKPOL Kota Banjar dan Bagian Hukum SETDA Kota Banjar | 4 Hari Kerja |

### 3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

#### a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes APB Desa antara lain :

| No | Persyaratan   | Hasil Pemeriksaan |       | Ket |
|----|---|-------------------|-------|-----|
|    |   | Ada               | Tidak |     |
| 1  | Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat; |                   |       |     |
| 2  | Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;  |                   |       |     |
| 3  | Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;   |                   |       |     |
| 4  | Rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang merinci pendapatan dan belanja desa                    |                   |       |     |
| 5  | Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang APB Desa                 |                   |       |     |
| 6  | Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan APB Desa selama satu tahun  |                   |       |     |
| 7  | Rencana anggaran biaya.   |                   |       |     |
| 8  | Keputusan walikota tentang Pengangkatan Kepala Desa   |                   |       |     |
| 9  | Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)                                    |                   |       |     |
| 10 | Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa   |                   |       |     |
| 11 | Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa  |                   |       |     |
| 12 | Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)  |                   |       |     |
| 13 | Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan  |                   |       |     |
| 14 | Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan  |                   |       |     |
| 15 | Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemeriksa   |                   |       |     |
| 16 | Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungutan Penerimaan Desa  |                   |       |     |
| 17 | Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa   |                   |       |     |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 18 | Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan bank                        |  |  |  |
| 19 | Buku Profil Desa tahun sebelumnya yang bersumber dari <i>website</i> |  |  |  |
| 20 | Pakta Integritas   |  |  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- b. Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Yang Tertuang Pada APB Desa Dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  2. RPJM Desa memuat visi dan misi, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  3. RPJM Desa selaras dengan arah kebijakan pembangunan kota sehingga program dan kegiatan pembangunan Kota dengan pembangunan Desa dapat terintegrasi.
  4. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  5. RPJM Desa dan RKP Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
  6. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kota
  7. RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
  8. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : dalam RKP tidak ada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dalam Raperdes APBDes ada | Pada APBDes agar peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang. |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Tanggal Pengembalian .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- c. Evaluasi kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Dana Transfer yang tertuang dalam APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan besaran Dana Desa yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  2. Kesesuaian Besaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan besaran Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  3. Kesesuaian Besaran Bagian Hasil bagi Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan Besaran Bagian Hasil bagi Pajak Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  4. Kesesuaian Besaran Bagian Hasil bagi Restribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan Besaran Bagian Hasil bagi Restribusi Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  5. Kesesuaian Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan atau bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan Keputusan Pemberi bantuan dengan Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan atau bantuan keuangan yang bersifat khusus yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi   | Penyempurnaan  |
|----|--|--|
| 1. | Contoh : dalam SK walikota tentang DD, penerimaan Desa sebesar Rp.100.000.000,00, dalam Raperdes APBDes Rp.110.000.000,00. | Besaran DD pada APBDesa agar disesuaikan dengan SK Walikota tentang DD sebesar Rp. 100.000.000,00. |
| 2. | Dst.....   |  |
| 3  | Dst.....   |  |

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Tanggal Pengembalian .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- d. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : Raperdes APB Desa penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i> | Raperdes APB Desa agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i> |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- e. Evaluasi kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Pendapatan
    - a. Rencana pendapatan Asli Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, dengan mempertimbangkan :
      - 1) Hasil usaha desa meliputi hasil BUMDes, Tanah Kas Desa, Tanah Desa, kegiatan usaha yang langsung ditangani oleh pemerintah desa.
      - 2) Kebijakan Penerimaan dari Swadaya, Partisipasi dan gotong royong dengan ketentuan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
      - 3) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi desa lainnya (tambatan perahu, pasar desa/kios desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dll) dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi desa), dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis hasil aset desa.
      - 4) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.

- 5) Penerimaan jasa bank dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.
  - 6) Penerimaan pungutan desa diatur dalam peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Rencana pendapatan desa dari Dana Transfer terdiri atas Dana Desa, Bagian dari Hasil pajak dan redistribusi daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kota.
  - c. Pendapatan Lain-lain terdiri atas Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat dan Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
    - 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
    - 2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## 2. Belanja

- a. Ketentuan pada pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa khusus penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- b. Ketentuan pada pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - 2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
    - b) operasional Pemerintah Desa;
    - c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    - d) insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- c. Kelompok Belanja pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas kegiatan :
  - 1) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
Penetapan kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - 2) Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa;  
Penetapan kelompok belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - 3) Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa;  
Penetapan kelompok belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa;  
Penetapan kelompok belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5) Kelompok Belanja Tak Terduga.  
Penetapan anggaran belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh diluar pemerintah desa. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya.

d. Jenis belanja pada struktur APB Desa terdiri atas :

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang/Jasa; dan
- 3) Belanja Modal.

(Penetapan Jenis belanja agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan anggaran APB Desa dengan realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang tercantum pada Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

3) Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Pembentukan dana cadangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa, dengan penggunaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dengan waktu yang telah ditentukan.

Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana cadangan paling sedikit memuat :

- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan



2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau badan usaha lainnya untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMDES atau badan usaha lainnya dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan Modal Desa Badan Usaha Milik Desa atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Apabila pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

4. Kesesuaian penempatan akun Pendapatan, kelompok Pendapatan dan Kode jenis pendapatan dan rincian pendapatan.
5. Kesesuaian penempatan akun Belanja, kelompok Belanja dan Kode jenis Belanja dan rincian Belanja.
6. Kesesuaian penempatan akun Pembiayaan, kelompok Pembiayaan dan Kode jenis Pembiayaan dan rincian Pembiayaan.
7. Kesesuaian perhitungan dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya pada Rancangan APB Desa tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga Barang / Jasa yang ditetapkan oleh Walikota dengan Realisasi Pelaksanaan kegiatan pada APB Desa berpedoman pada harga pasar setempat. Apabila harga pasar lebih tinggi dari standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Walikota, maka agar segera mengusulkan perubahan standar satuan harga barang/jasa kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
9. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan jasa konsultan perencanaan, untuk selanjutnya Rencana Anggaran Biaya tersebut dapat diasistensikan kepada TAD.

Kode akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta jenis belanja adalah sebagai berikut :

Kode Rekening Pendapatan

| KODE REKENING |   |   |   |   |  | URAIAN                                       |
|---------------|---|---|---|---|--|--|
| 1             |   |   |   |   |  | PENDAPATAN                                   |
| 1             | 1 |   |   |   |  | <i>Pendapatan Asli Desa</i>                  |
| 1             | 1 | 1 |   |   |  | Hasil Usaha                                  |
| 1             | 1 | 2 |   |   |  | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong       |
| 1             | 1 | 3 |   |   |  | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah      |
|               |   |   |   |   |  |  |
| 1             | 2 |   |   |   |  | <i>Pendapatan Transfer</i>                   |
| 1             | 2 | 1 |   |   |  | Dana Desa                                    |
| 1             | 2 | 2 |   |   |  | Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah |
| 1             | 2 | 3 |   |   |  | Alokasi Dana Desa                            |
| 1             | 2 | 4 |   |   |  | Bantuan Keuangan                             |
| 1             | 2 | 4 | 1 |   |  | Bantuan Provinsi                             |
| 1             | 2 | 4 | 1 | 1 |  | Bantuan Keuangan Kegiatan Peningkatan        |

|   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
|   |   |   |   |   |  |  |  |  | Infrasutruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  | dst.....  |
| 1 | 2 | 4 | 2 |   |  |  |  |  | Bantuan Kota  |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | dst.....  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
| 1 | 3 |   |   |   |  |  |  |  | <i>Pendapatan Lain-lain</i>   |
| 1 | 3 | 1 |   |   |  |  |  |  | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat                     |
| 1 | 3 | 2 |   |   |  |  |  |  | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah  |

Kode Rekening Belanja

| KODE REKENING |   |   |   |   |   |  |  | URAIAN   |
|---------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 2             |   |   |   |   |   |  |  | Belanja  |
| 2             | 1 |   |   |   |   |  |  | Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa           |
| 2             | 1 | 1 |   |   |   |  |  | Penghasilan dan Tunjangan                          |
| 2             | 1 | 2 |   |   |   |  |  | Operasional Pemerintah Desa                        |
| 2             | 1 | 3 |   |   |   |  |  | Operasional BPD                                    |
| 2             | 1 | 3 | 1 |   |   |  |  | Operasional Selain Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
| 2             | 1 | 3 | 2 |   |   |  |  | Penyelenggaraan musyawarah Desa                    |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 1 |   |  |  | Penataan Desa                                      |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | Pemekaran Desa                                     |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  | Penggabungan Desa                                  |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  | Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan            |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 2 |   |  |  | Perencanaan Desa                                   |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | Penetapan Kewenangan Desa                          |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | Penetapan RPJM Desa                                |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |  | Penetapan RAPBDes                                  |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 3 |   |  |  | Kerja sama Desa                                    |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  | Kerja sama Desa antar -Desa                        |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | Kerja sama Desa dengan pihak ketiga                |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 4 |   |  |  | Rencana Investasi Masuk Desa                       |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 5 |   |  |  | Pembentukan dan Pembubaran BUMDES                  |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |  |  | Penetapan BUMDES                                   |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |  |  | Penetapan Permodalan BUMDES                        |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |  |  | Penetapan Pengurus BUMDES                          |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |  |  | Laporan Penyelenggaraan BUMDES                     |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |  |  | Pembubaran BUMDES                                  |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |  |  | dst.....   |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 6 |   |  |  | Penambahan dan Pelepasan Aset Desa                 |
| 2             | 1 | 3 | 2 | 7 |   |  |  | Kejadian Luar Biasa                                |
| 2             | 1 | 4 |   |   |   |  |  | Insentif RT/RW                                     |
| 2             | 1 | 5 |   |   |   |  |  | penetapan dan penegasan batas Desa                 |
| 2             | 1 | 5 | 1 |   |   |  |  | Pembangunan Tapal Batas Desa, Dusun, RW dan RT     |
| 2             | 1 | 5 | 2 |   |   |  |  | Pemeliharaan Tapal Batas Desa, Dusun, RW dan RT    |
| 2             | 1 | 5 | 3 |   |   |  |  | dst.....   |
| 2             | 1 | 6 |   |   |   |  |  | pendataan Desa                                     |
| 2             | 1 | 6 | 1 |   |   |  |  | Pendataan Penduduk                                 |
| 2             | 1 | 6 | 2 |   |   |  |  | Penyusunan Profil Desa                             |
| 2             | 1 | 6 | 3 |   |   |  |  | dst.....   |
| 2             | 1 | 7 |   |   |   |  |  | Penyusunan tata ruang Desa                         |

|   |   |    |   |   |  |  |  |  |   |
|---|---|----|---|---|--|--|--|--|---|
| 2 | 1 | 7  | 1 |   |  |  |  |  | Inventarisasi dan penetapan nama jalan di Desa                        |
| 2 | 1 | 7  | 2 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 1 | 8  |   |   |  |  |  |  | Penetapan Peraturan Desa  |
| 2 | 1 | 8  | 1 |   |  |  |  |  | Penetapan Organisasi Pemerintah Desa                                  |
| 2 | 1 | 8  | 2 |   |  |  |  |  | Pemilihan Kepala Desa   |
| 2 | 1 | 8  | 3 |   |  |  |  |  | Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa                                |
| 2 | 1 | 8  | 4 |   |  |  |  |  | Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa                      |
| 2 | 1 | 8  | 5 |   |  |  |  |  | Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan atau Balai Desa            |
| 2 | 1 | 8  | 6 |   |  |  |  |  | Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa                        |
| 2 | 1 | 8  | 7 |   |  |  |  |  | Penetapan Desa dalam keadaan darurat                                  |
| 2 | 1 | 8  | 8 |   |  |  |  |  | penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya                  |
| 2 | 1 | 8  | 9 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 1 | 9  |   |   |  |  |  |  | Penyelenggaraan Perencanaan Desa                                      |
| 2 | 1 | 9  | 1 |   |  |  |  |  | Penyusunan Kewenangan Desa  |
| 2 | 1 | 9  | 2 |   |  |  |  |  | Penyusunan RPJM Desa  |
| 2 | 1 | 9  | 3 |   |  |  |  |  | Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa                             |
| 2 | 1 | 9  | 4 |   |  |  |  |  | Penyusunan RAPBDes  |
| 2 | 1 | 9  | 5 |   |  |  |  |  | Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                   |
| 2 | 1 | 9  | 6 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 1 | 10 |   |   |  |  |  |  | Pengelolaan informasi Desa  |
| 2 | 1 | 10 | 1 |   |  |  |  |  | Sistem administrasi dan informasi Desa                                |
| 2 | 1 | 10 | 2 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 1 | 11 |   |   |  |  |  |  | Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa       |
| 2 | 1 | 11 | 1 |   |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                  |
| 2 | 1 | 11 | 2 |   |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa       |
| 2 | 1 | 11 | 3 |   |  |  |  |  | Penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                |
| 2 | 1 | 11 | 4 |   |  |  |  |  | Penyusunan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa          |
|   | 1 | 11 | 5 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 1 | 12 |   |   |  |  |  |  | Penyelenggaraan kerjasama Desa  |
| 2 | 1 | 12 | 1 |   |  |  |  |  | Kerja sama antar Desa   |
| 2 | 1 | 12 | 2 |   |  |  |  |  | Kerjasama dengan Pemerintah   |
| 2 | 1 | 12 | 3 |   |  |  |  |  | Kerjasama dengan pihak ketiga   |
| 2 | 1 | 12 | 4 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 1 | 13 |   |   |  |  |  |  | kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.                                 |
| 2 | 1 | 13 | 1 |   |  |  |  |  | Pengelolaan Kekayaan Milik Desa                                       |
| 2 | 1 | 13 | 1 | 1 |  |  |  |  | Sertifikasi Tanah Desa  |
| 2 | 1 | 13 | 1 | 2 |  |  |  |  | Penertiban Aset Desa  |
| 2 | 1 | 13 | 1 | 3 |  |  |  |  | Pemeliharaan Aset Desa  |
| 2 | 1 | 13 | 1 | 4 |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 1 | 13 | 2 |   |  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor                                 |
| 2 | 1 | 13 | 3 |   |  |  |  |  | Pengelolaan arsip Desa  |
| 2 | 1 | 13 | 4 |   |  |  |  |  | Penjaringan, Penyaringan dan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | 1 | 13 | 5 |   |  |  |  |  | Percepatan PBB-P2   |

|   |   |    |   |   |   |  |  |  |   |
|---|---|----|---|---|---|--|--|--|---|
| 2 | 1 | 13 | 6 |   |   |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 2 |    |   |   |   |  |  |  | Bidang pelaksanaan pembangunan Desa   |
| 2 | 2 | 1  |   |   |   |  |  |  | Pelayanan Dasar Desa  |
| 2 | 2 | 1  | 1 |   |   |  |  |  | pengelolaan dan pembinaan Posyandu  |
| 2 | 2 | 1  | 1 | 1 |   |  |  |  | Pembangunan gedung Posyandu   |
| 2 | 2 | 1  | 1 | 2 |   |  |  |  | Pemeliharaan gedung Posyandu  |
| 2 | 2 | 1  | 1 | 3 |   |  |  |  | Penyelenggaraan Posyandu  |
| 2 | 2 | 1  | 1 | 4 |   |  |  |  | Sarana dan Prasarana Posyandu   |
| 2 | 2 | 1  | 1 | 5 |   |  |  |  | dst.  |
| 2 | 2 | 1  | 2 |   |   |  |  |  | pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes  |
| 2 | 2 | 1  | 3 |   |   |  |  |  | pengembangan tenaga kesehatan Desa  |
| 2 | 2 | 1  | 4 |   |   |  |  |  | pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional                                  |
| 2 | 2 | 1  | 5 |   |   |  |  |  | pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa            |
| 2 | 2 | 1  | 6 |   |   |  |  |  | pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini                                   |
| 2 | 2 | 1  | 6 | 1 |   |  |  |  | Pembangunan gedung PAUD   |
| 2 | 2 | 1  | 6 | 2 |   |  |  |  | Pemeliharaan gedung PAUD  |
| 2 | 2 | 1  | 6 | 3 |   |  |  |  | Penyelenggaraan PAUD  |
| 2 | 2 | 1  | 6 | 4 |   |  |  |  | Sarana dan Prasarana PAUD   |
| 2 | 2 | 1  | 6 | 5 |   |  |  |  | dst.  |
| 2 | 2 | 1  | 7 |   |   |  |  |  | pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa |
| 2 | 2 | 1  | 7 | 1 |   |  |  |  | pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar   |
| 2 | 2 | 1  | 7 | 2 |   |  |  |  | pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya   |
| 2 | 2 | 1  | 7 | 3 |   |  |  |  | pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa   |
| 2 | 2 | 1  | 7 | 3 | 1 |  |  |  | Pembangunan Perpustakaan Desa   |
| 2 | 2 | 1  | 7 | 3 | 2 |  |  |  | Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa  |
| 2 | 2 | 1  | 7 | 3 | 3 |  |  |  | dst.  |
| 2 | 2 | 1  | 8 |   |   |  |  |  | fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa                    |
| 2 | 2 | 1  | 8 | 1 |   |  |  |  | Pembangunan gedung DTA / DTW  |
| 2 | 2 | 1  | 8 | 2 |   |  |  |  | Pemeliharaan gedung DTA / DTW   |
| 2 | 2 | 1  | 8 | 3 |   |  |  |  | Operasional Penyelenggaraan DTA / DTW   |
| 2 | 2 | 1  | 8 | 4 |   |  |  |  | Sarana dan Prasarana DTA / DTW  |
| 2 | 2 | 1  | 8 | 5 |   |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 2 | 2  |   |   |   |  |  |  | Sarana dan Prasarana Desa   |
| 2 | 2 | 2  | 1 |   |   |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa                                    |
| 2 | 2 | 2  | 1 | 1 |   |  |  |  | pembangunan kantor dan balai Desa   |
| 2 | 2 | 2  | 1 | 2 |   |  |  |  | pemeliharaan kantor dan balai Desa  |
| 2 | 2 | 2  | 2 |   |   |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa   |
| 2 | 2 | 2  | 2 | 1 |   |  |  |  | pembangunan jalan Desa  |
| 2 | 2 | 2  | 2 | 2 |   |  |  |  | pemeliharaan jalan Desa   |
| 2 | 2 | 2  | 3 |   |   |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani   |
| 2 | 2 | 2  | 3 | 1 |   |  |  |  | pembangunan jalan usaha tani  |
| 2 | 2 | 2  | 3 | 2 |   |  |  |  | pemeliharaan jalan usaha tani   |
| 2 | 2 | 2  | 4 |   |   |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan embung Desa  |
| 2 | 2 | 2  | 4 | 1 |   |  |  |  | pembangunan embung Desa   |

|   |   |   |    |   |  |  |  |  |  |   |
|---|---|---|----|---|--|--|--|--|--|---|
| 2 | 2 | 2 | 4  | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan embung Desa  |
| 2 | 2 | 2 | 5  |   |  |  |  |  |  | pembangunan energi baru dan terbarukan  |
| 2 | 2 | 2 | 6  |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah                                       |
| 2 | 2 | 2 | 6  | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan rumah ibadah  |
| 2 | 2 | 2 | 6  | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan rumah ibadah   |
|   |   |   |    |   |  |  |  |  |  |   |
| 2 | 2 | 2 | 7  |   |  |  |  |  |  | pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan  |
| 2 | 2 | 2 | 8  |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan                                |
| 2 | 2 | 2 | 8  | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan sanitasi lingkungan   |
| 2 | 2 | 2 | 8  | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan sanitasi lingkungan  |
| 2 | 2 | 2 | 9  |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa                            |
| 2 | 2 | 2 | 9  | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan air bersih berskala Desa  |
| 2 | 2 | 2 | 9  | 2 |  |  |  |  |  | pengelolaan air bersih berskala Desa  |
| 2 | 2 | 2 | 10 |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier                                    |
| 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan irigasi tersier   |
| 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan irigasi tersier  |
| 2 | 2 | 2 | 11 |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa                                      |
| 2 | 2 | 2 | 11 | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan lapangan Desa   |
| 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan lapangan Desa  |
| 2 | 2 | 2 | 12 |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan taman Desa   |
| 2 | 2 | 2 | 12 | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan taman Desa  |
| 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan taman Desa   |
| 2 | 2 | 2 | 13 |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan |
| 2 | 2 | 2 | 13 | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan saluran untuk budidaya perikanan                                    |
| 2 | 2 | 2 | 13 | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan                                   |
| 2 | 2 | 2 | 13 | 3 |  |  |  |  |  | pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan                                    |
| 2 | 2 | 2 | 14 |   |  |  |  |  |  | pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa                              |
| 2 | 2 | 2 | 15 |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kantor dan balai Desa                    |
| 2 | 2 | 2 | 15 | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan fasilitas kantor dan balai Desa                                     |
| 2 | 2 | 2 | 15 | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan fasilitas kantor dan balai Desa                                    |
| 2 | 2 | 2 | 16 |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan Desa                               |
| 2 | 2 | 2 | 16 | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan fasilitas jalan Desa  |
| 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan fasilitas jalan Desa   |
| 2 | 2 | 2 | 17 |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan usaha tani                         |
| 2 | 2 | 2 | 17 | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan fasilitas jalan usaha tani  |
| 2 | 2 | 2 | 17 | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan fasilitas jalan usaha tani   |
| 2 | 2 | 2 | 18 |   |  |  |  |  |  | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan lingkungan                                   |
| 2 | 2 | 2 | 18 | 1 |  |  |  |  |  | Pembangunan jalan lingkungan  |
| 2 | 2 | 2 | 18 | 2 |  |  |  |  |  | Pemeliharaan jalan lingkungan   |
| 2 | 2 | 2 | 19 |   |  |  |  |  |  | pembangunan dan pemeliharaan Balai Dusun  |
| 2 | 2 | 2 | 19 | 1 |  |  |  |  |  | pembangunan balai Dusun   |
| 2 | 2 | 2 | 19 | 2 |  |  |  |  |  | pemeliharaan balai Dusun  |

|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |
|---|---|---|----|---|--|--|--|--|---|
| 2 | 2 | 2 | 20 |   |  |  |  |  | Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan  |
| 2 | 2 | 2 | 21 |   |  |  |  |  | dst .....   |
| 2 | 2 | 3 |    |   |  |  |  |  | Pengembangan Ekonomi lokal Desa   |
| 2 | 2 | 3 | 1  |   |  |  |  |  | pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;   |
| 2 | 2 | 3 | 1  | 1 |  |  |  |  | pembangunan pasar Desa dan kios Desa;   |
| 2 | 2 | 3 | 1  | 2 |  |  |  |  | pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;   |
| 2 | 2 | 3 | 2  |   |  |  |  |  | pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;                                  |
| 2 | 2 | 3 | 2  | 1 |  |  |  |  | pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa;  |
| 2 | 2 | 3 | 2  | 2 |  |  |  |  | pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;  |
| 2 | 2 | 3 | 3  |   |  |  |  |  | pengembangan usaha mikro berbasis Desa;   |
| 2 | 2 | 3 | 3  | 1 |  |  |  |  | pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;   |
| 2 | 2 | 3 | 4  |   |  |  |  |  | pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;                                |
| 2 | 2 | 3 | 4  | 1 |  |  |  |  | pembangunan keramba jaring apung dan bagan ikan;  |
| 2 | 2 | 3 | 4  | 2 |  |  |  |  | pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;  |
| 2 | 2 | 3 | 5  |   |  |  |  |  | pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;                  |
| 2 | 2 | 3 | 5  | 1 |  |  |  |  | pembangunan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;                                  |
| 2 | 2 | 3 | 5  | 2 |  |  |  |  | pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;                                  |
| 2 | 2 | 3 | 6  |   |  |  |  |  | penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;                                      |
| 2 | 2 | 3 | 6  | 1 |  |  |  |  | penetapan komoditas unggulan pertanian Desa;  |
| 2 | 2 | 3 | 6  | 2 |  |  |  |  | penetapan komoditas unggulan perikanan Desa;  |
| 2 | 2 | 3 | 7  |   |  |  |  |  | pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; |
| 2 | 2 | 3 | 8  |   |  |  |  |  | penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;                          |
| 2 | 2 | 3 | 8  | 1 |  |  |  |  | penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian   |
| 2 | 2 | 3 | 8  | 2 |  |  |  |  | penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk perikanan;  |
| 2 | 2 | 3 | 9  |   |  |  |  |  | pengembangan benih lokal;   |
| 2 | 2 | 3 | 10 |   |  |  |  |  | pengembangan ternak secara kolektif;  |
| 2 | 2 | 3 | 11 |   |  |  |  |  | pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;   |
| 2 | 2 | 3 | 11 | 1 |  |  |  |  | pembangunan energi mandiri;   |
| 2 | 2 | 3 | 11 | 2 |  |  |  |  | pengelolaan energi mandiri;   |
| 2 | 2 | 3 | 12 |   |  |  |  |  | pendirian dan pengelolaan BUM Desa;   |
| 2 | 2 | 3 | 12 | 1 |  |  |  |  | pendirian BUM Desa;   |
| 2 | 2 | 3 | 12 | 2 |  |  |  |  | pengelolaan BUM Desa;   |
| 2 | 2 | 3 | 13 |   |  |  |  |  | pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;  |
| 2 | 2 | 3 | 13 | 1 |  |  |  |  | pembangunan tambatan perahu;  |

|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |
|---|---|---|----|---|--|--|--|--|---|
| 2 | 2 | 3 | 13 | 2 |  |  |  |  | pengelolaan tambatan perahu;  |
| 2 | 2 | 3 | 14 |   |  |  |  |  | pengelolaan padang gembala;   |
| 2 | 2 | 3 | 15 |   |  |  |  |  | pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata pemerintah kota;                   |
| 2 | 2 | 3 | 16 |   |  |  |  |  | pengelolaan balai benih ikan;   |
| 2 | 2 | 3 | 17 |   |  |  |  |  | pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan                           |
| 2 | 2 | 3 | 18 |   |  |  |  |  | pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. |
|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 2 | 4 |    |   |  |  |  |  | Pemanfaatan Sumber daya alam dan lingkungan Desa  |
| 2 | 2 | 4 | 1  |   |  |  |  |  | penghijauan   |
| 2 | 2 | 4 | 2  |   |  |  |  |  | pembuatan terasering  |
| 2 | 2 | 4 | 3  |   |  |  |  |  | perlindungan mata air   |
| 2 | 2 | 4 | 4  |   |  |  |  |  | pembersihan daerah aliran sungai  |
| 2 | 2 | 4 | 5  |   |  |  |  |  | kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.   |
|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 3 |   |    |   |  |  |  |  | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  |
| 2 | 3 | 1 |    |   |  |  |  |  | Pembinaan lembaga kemasyarakatan  |
| 2 | 3 | 1 | 1  |   |  |  |  |  | Pelatihan dan Pembinaan LPM   |
| 2 | 3 | 1 | 2  |   |  |  |  |  | Pelatihan dan Pembinaan PKK   |
| 2 | 3 | 1 | 3  |   |  |  |  |  | Pelatihan dan Pembinaan Karang Taruna   |
| 2 | 3 | 1 | 4  |   |  |  |  |  | Pelatihan dan Pembinaan Posyandu  |
| 2 | 3 | 1 | 5  |   |  |  |  |  | Pelatihan dan Pembinaan RT/RW   |
| 2 | 3 | 1 | 6  |   |  |  |  |  | Operasional Kegiatan LPM  |
| 2 | 3 | 1 | 7  |   |  |  |  |  | Operasional Kegiatan PKK  |
| 2 | 3 | 1 | 8  |   |  |  |  |  | Operasional Kegiatan Karang Taruna  |
| 2 | 3 | 1 | 9  |   |  |  |  |  | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan   |
| 2 | 3 | 1 | 10 |   |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Kelembagaan Desa  |
| 2 | 3 | 1 | 11 |   |  |  |  |  | Asuransi Kematian RT/RW   |
| 2 | 3 | 1 | 12 |   |  |  |  |  | dst.....  |
|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 3 | 2 |    |   |  |  |  |  | Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  |
| 2 | 3 | 2 | 1  |   |  |  |  |  | Pelatihan dan Pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat                                   |
| 2 | 3 | 2 | 2  |   |  |  |  |  | Penunjang Kegiatan Pos Keamanan Lingkungan  |
| 2 | 3 | 2 | 3  |   |  |  |  |  | dst.....  |
|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 3 | 3 |    |   |  |  |  |  | Pembinaan kerukunan umat beragama   |
| 2 | 3 | 3 | 1  |   |  |  |  |  | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan  |
| 2 | 3 | 3 | 2  |   |  |  |  |  | Pembinaan dan Pelatihan Keagamaan   |
| 2 | 3 | 3 | 3  |   |  |  |  |  | dst.....  |
|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 3 | 4 |    |   |  |  |  |  | Pengadaan sarana dan prasarana olah raga  |
| 2 | 3 | 4 | 1  |   |  |  |  |  | Sarana Olahraga   |
| 2 | 3 | 4 | 2  |   |  |  |  |  | Perlengkapan Olahraga   |
| 2 | 3 | 4 | 3  |   |  |  |  |  | Pembinaan Olahraga Desa   |
| 2 | 3 | 4 | 4  |   |  |  |  |  | dst.....  |
|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 3 | 5 |    |   |  |  |  |  | Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat   |
| 2 | 3 | 5 | 1  |   |  |  |  |  | Pengelolaan Cagar Budaya  |
| 2 | 3 | 5 | 2  |   |  |  |  |  | Pembinaan Kesenian Daerah/Keagamaan   |

|   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| 2 | 3 | 5 | 3 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 3 | 6 |   |   |  |  |  |  | Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.  |
| 2 | 3 | 6 | 1 |   |  |  |  |  | Kegiatan .....  |
| 2 | 3 | 6 | 2 |   |  |  |  |  | dst.....  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 4 |   |   |   |  |  |  |  | Bidang Pemberdayaan Masyarakat  |
| 2 | 4 | 1 |   |   |  |  |  |  | Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan   |
| 2 | 4 | 1 | 1 |   |  |  |  |  | Pelatihan Kewirausahaan   |
| 2 | 4 | 1 | 2 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 4 | 2 |   |   |  |  |  |  | Teknologi tepat guna  |
| 2 | 4 | 2 | 1 |   |  |  |  |  | Warung Teknologi  |
| 2 | 4 | 2 | 2 |   |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 4 | 3 |   |   |  |  |  |  | Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa   |
| 2 | 4 | 3 | 1 |   |  |  |  |  | Penguatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa  |
| 2 | 4 | 3 | 2 |   |  |  |  |  | Penguatan Kapasitas BPD   |
| 2 | 4 | 3 | 3 |   |  |  |  |  | dst.....  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 4 | 4 |   |   |  |  |  |  | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat                                    |
| 2 | 4 | 5 |   |   |  |  |  |  | Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan kader pemberdayaan masyarakat |
| 2 | 4 | 6 |   |   |  |  |  |  | Peningkatan kapasitas masyarakat,   |
| 2 | 4 | 6 | 1 |   |  |  |  |  | Kader pemberdayaan masyarakat Desa  |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa  |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 4 | 6 | 2 |   |  |  |  |  | Kelompok usaha ekonomi produktif  |
| 2 | 4 | 6 | 3 |   |  |  |  |  | Kelompok perempuan,   |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  | Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK Desa  |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 4 | 6 | 4 |   |  |  |  |  | Kelompok tani,  |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |  |  |  |  | Operasional Kegiatan KTNA   |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  | Operasional Kegiatan Temu Tani  |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 3 |  |  |  |  | Operasional Kegiatan KWT  |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  | Operasional Kegiatan Kelompok Tani  |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 5 |  |  |  |  | Operasional Kegiatan P3A Mitra Cai  |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |  |  |  |  | Kawasan Rumah Pangan Lestari  |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 7 |  |  |  |  | Operasional Kegiatan Pertanian  |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 8 |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 4 | 6 | 5 |   |  |  |  |  | Kelompok masyarakat miskin,   |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |  |  |  |  | Pemberian Santunan Sosial kepada keluarga miskin  |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |  |  |  |  | Bantuan Pendidikan  |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  | Bantuan Kesehatan Keluarga Miskin   |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |  |  |  |  | Peduli Lansia   |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  | Khitanan Masal  |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 6 |  |  |  |  | Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni  |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 7 |  |  |  |  | dst.....  |
| 2 | 4 | 6 | 6 |   |  |  |  |  | Kelompok pengrajin,   |



|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 2 | 4 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  | Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, |
| 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  | Kelompok pemuda                           |
| 2 | 4 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  | Kelompok lain sesuai kondisi Desa.        |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 2 | 5 |   |   |  |  |  |  |  |  | Bidang Tak Terduga                        |
| 2 | 5 | 1 |   |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Kejadian Luar Biasa              |
| 2 | 5 | 2 |   |  |  |  |  |  |  | dst.....                                  |

### V.3 Kode Rekening Pembiayaan

| KODE REKENING |   |   |  |  |  |  |  | URAIAN |  |                                     |
|---------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|--|-------------------------------------|
| 3             |   |   |  |  |  |  |  |        |  | PEMBIAYAAN                          |
| 3             | 1 |   |  |  |  |  |  |        |  | <i>Penerimaan Pembiayaan</i>        |
| 3             | 1 | 1 |  |  |  |  |  |        |  | SILPA                               |
| 3             | 1 | 2 |  |  |  |  |  |        |  | Pencairan Dana Cadangan             |
| 3             | 1 | 3 |  |  |  |  |  |        |  | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan |
|               |   |   |  |  |  |  |  |        |  |                                     |
| 3             | 2 |   |  |  |  |  |  |        |  | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>       |
| 3             | 2 | 1 |  |  |  |  |  |        |  | Pembentukan Dana Cadangan           |
| 3             | 2 | 2 |  |  |  |  |  |        |  | Penyertaan Modal Desa               |
|               |   |   |  |  |  |  |  |        |  |                                     |

### Jenis Belanja

| KODE REKENING |   |   |   |   |   |   |    | URAIAN |  |   |
|---------------|---|---|---|---|---|---|----|--------|--|---|
| x             | x | x | x | x | x | 1 |    |        |  | Belanja Pegawai   |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 1  |        |  | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa        |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 2  |        |  | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa                |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 3  |        |  | Tunjangan BPD   |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 4  |        |  | Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 5  |        |  | Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa          |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 5  | 1      |  | Kepala Desa   |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 5  | 2      |  | Sekretaris Desa   |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 5  | 3      |  | Perangkat Desa  |
| x             | x | x | x | x | x | 1 | 6  |        |  | dst.....  |
|               |   |   |   |   |   |   |    |        |  |   |
| x             | x | x | x | x | x | 2 |    |        |  | Belanja Barang dan Jasa                                 |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 1  |        |  | alat tulis kantor                                       |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 2  |        |  | benda pos   |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 3  |        |  | bahan/material  |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 4  |        |  | jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 5  |        |  | jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor        |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 6  |        |  | jasa jaminan barang milik desa                          |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 7  |        |  | jasa perizinan kendaraan dinas                          |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 8  |        |  | jasa kebersihan kantor                                  |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 9  |        |  | jasa keamanan kantor                                    |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 10 |        |  | komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 11 |        |  | pemeliharaan gedung kantor                              |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 12 |        |  | pemeliharaan kendaraan dinas                            |
| x             | x | x | x | x | x | 2 | 13 |        |  | peralatan rumah tangga                                  |

|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| x | x | x | x | x | x | 2 | 14 |   | bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 15 |   | cetak/penggandaan                                     |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 16 |   | sewa kantor desa                                      |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 17 |   | sewa perlengkapan dan peralatan kantor                |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 18 |   | makanan dan minuman                                   |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 19 |   | pakaian dinas dan atributnya                          |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 20 |   | pakaian khusus hari-hari tertentu                     |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 21 |   | perjalanan dinas                                      |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 22 |   | upah kerja  |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 23 |   | honorarium narasumber/ahli                            |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 24 |   | honorarium tenaga ahli                                |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 25 |   | Honorarium  |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 26 |   | uang saku   |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 27 |   | uang lembur   |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 28 |   | pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 29 |   | Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa      |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 30 |   | obat-obatan   |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 31 |   | Dokumentasi   |
| x | x | x | x | x | x | 2 | 32 |   | dst   |
|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| x | x | x | x | x | x | 3 |    |   | Belanja Modal   |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 1  |   | Bahan/Matrial   |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 2  |   | Aspal   |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 3  |   | Bahan Bakar Minyak                                    |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 4  |   | Komputer  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 5  |   | Laptop  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 6  |   | Meja dan Kursi  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 7  |   | Mesin Tik   |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 8  |   | Kendaraan Dinas                                       |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 8  | 1 | Roda dua  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 8  | 2 | Roda empat  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 8  | 3 | dst.....  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 9  |   | Lemari  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 10 |   | Podium  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 11 |   | Printer   |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 12 |   | Proyektor   |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 13 |   | Layar Proyektor                                       |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 14 |   | AC  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 15 |   | Camera Digital  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 16 |   | Handy Camp  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 17 |   | Genset  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 18 |   | Mesin Rumput  |
| x | x | x | x | x | x | 3 | 19 |   | dst.....  |
|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi   | Penyempurnaan   |
|----|--|---|
| 1. | Contoh : dalam Raperdes APB Desa terdapat ketidak tepatan penempatan kode rekening kelompok belanja 2.2. 1 sarana prasarana seharusnya 2.2.1 pelayanan dasar | Penempatan kode rekening kelompok belanja 2.2.1 sarana prasarana seharusnya 2.2.1 pelayanan dasar agar disesuaikan. |
| 2. | Dst.....   |   |
| 3  | Dst.....   |   |

Tanggal Penerimaan .....

Tanggal Pemeriksaan .....

Tanggal Pengembalian .....

Pelaksana Evaluasi,

.....

NIP.

## B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN

### 1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan meliputi :

- kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- terjadi pungutan ganda antara kewenangan pemerintah kota dan kewenangan pemerintah desa.

### 2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

| NO | URAIAN  | PELAKSANA  | WAKTU        |
|----|---|--|--------------|
| 1. | Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang Pungutan   | Kantor PMPDKPOL  | 2 Hari Kerja |
| 2. | Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa                   | BAPPEDA Kota Banjar  | 4 Hari Kerja |
| 3. | bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi             | Bagian TAPEM SETDA Kota Banjar                                 | 2 Hari Kerja |
| 4. | terjadi pungutan ganda antara kewenangan pemerintah kota dan kewenangan pemerintah desa                       | DPPKA Kota Banjar Dishubkominfo                                | 3 Hari Kerja |
| 5. | kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Bagian Hukum SETDA Kota Banjar                                 | 5 Hari Kerja |
| 6. | Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi  | Kantor PMPDKPOL Kota Banjar dan Bagian Hukum SETDA Kota Banjar | 4 Hari Kerja |

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes Pungutan antara lain :

| No | Persyaratan   | Hasil Pemeriksaan |       | Ket |
|----|---|-------------------|-------|-----|
|    |   | Ada               | Tidak |     |
| 1. | Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat. |                   |       |     |
| 2. | Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;  |                   |       |     |
| 3. | Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.   |                   |       |     |
| 4. | Peraturan desa tentang APB Desa tahun berkenaan.  |                   |       |     |
| 5. | Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang Pungutan Desa.           |                   |       |     |
| 6. | Daftar hadir Peserta Musyawarah   |                   |       |     |

Tanggal Penerimaan .....

Tanggal Pemeriksaan .....

Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi

1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
4. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan, dalam APB Desa ada | Pada APBDes agar Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang. |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....

Tanggal Pemeriksaan .....

Tanggal Pengembalian .....

Pelaksana Evaluasi,

.....

NIP.

- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
  2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
  3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak ditetapkannya Peraturan Desa tentang pungutan.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 bahwa jasa layanan administrasi kepada masyarakat desa dilarang ada pungutan, dalam Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dicantumkan | Agar Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan tidak melakukan pungutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015. |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- d. Terjadi pungutan ganda antara kewenangan pemerintah kota dan kewenangan pemerintah desa  
 Ketentuan yang perlu di evaluasi antara lain dalam Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dilarang adanya pungutan ganda, yaitu pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota tidak boleh dipungut lagi oleh pemerintah desa

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan   |
|----|---|---|
| 1. | Contoh : Pemerintah Kota telah menetapkan Pungutan/ restribusi parkir, dalam Raperdes muncul adanya pungutan parkir | Agar Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan tidak melakukan pungutan/ restribusi parkir, karena sudah menjadi kewenangan kota. |
| 2. | Dst.....  |   |
| 3  | Dst.....  |   |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- e. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan
  3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : Raperdes Pungutan penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i> | Raperdes Pungutan agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i> |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

**C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TATA RUANG**

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang meliputi :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- d. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

| NO | URAIAN  | PELAKSANA  | WAKTU        |
|----|---|--|--------------|
| 1. | Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang Pungutan   | Kantor PMPDKPOL  | 2 Hari Kerja |
| 2. | Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa                   | BAPPEDA Kota Banjar  | 4 Hari Kerja |
| 3. | sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota  | DCKTLH Kota Banjar   | 4 Hari Kerja |
| 4. | bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi               | Bagian TAPEM SETDA Kota Banjar                                 | 3 Hari Kerja |
| 5. | kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Bagian Hukum SETDA Kota Banjar                                 | 3 Hari Kerja |
| 6. | Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi  | Kantor PMPDKPOL Kota Banjar dan Bagian Hukum SETDA Kota Banjar | 4 Hari Kerja |

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes tata ruang antara lain :

| No | Persyaratan  | Hasil Pemeriksaan |       | Ket |
|----|--|-------------------|-------|-----|
|    |  | Ada               | Tidak |     |
| 1. | Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dari Pemerintah Desa kepada Walikota |                   |       |     |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | melalui Camat.   |  |  |  |
| 2. | Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;   |  |  |  |
| 3. | Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.                                      |  |  |  |
| 4. | Peraturan desa tentang APB Desa tahun berkenaan.   |  |  |  |
| 5. | Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang tata ruang. |  |  |  |
| 6. | Daftar hadir Peserta Musyawarah  |  |  |  |

Tanggal Penerimaan .....

Tanggal Pemeriksaan .....

Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
  3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
  4. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang tata ruang, dalam APB Desa ada | Pada APBDes agar Penyusunan Peraturan Desa tentang tata ruang dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang. |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....

Tanggal Pemeriksaan .....

Tanggal Pengembalian .....

Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.



- c. Singkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota.  
Hal yang perlu di evaluasi adalah Tata ruang desa selaras dengan tata ruang kota.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi   | Penyempurnaan  |
|----|--|--|
| 1. | Contoh : dalam rancangan peraturan desa bahwa lokasi yang diatur akan dijadikan gudang padi, dalam ketentuan RPJM Kota Banjar bahwa lokasi yang diatur dalam Raperdes akan digunakan sebagai lumbung padi. | Agar dalam Rancangan Peraturan Desa menyesuaikan dengan RPJM Kota. |
| 2. | Dst.....   |  |
| 3  | Dst.....   |  |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- d. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
  2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
  3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak ditetapkannya Peraturan Desa tentang Tata Ruang.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : dalam ketentuan RPJM Kota Banjar bahwa lokasi yang diatur dalam Raperdes akan digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, dalam Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang akan digunakan sebagai pemukiman. | Agar dalam Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang lokasi yang diatur agar direncanakan sebagai Ruang Terbuka Hijau. |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Tanggal Pengembalian .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- e. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang.
  3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : Raperdes Tata Ruang penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i> | Raperdes Tata Ruang agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i> |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Tanggal Pengembalian .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

#### **D. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DESA**

##### 1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi meliputi :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

| NO | URAIAN  | PELAKSANA  | WAKTU        |
|----|---|--|--------------|
| 1. | Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang organisasi Pemerintah Desa   | Kantor PMPDKPOL  | 2 Hari Kerja |
| 2. | Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa                   | BAPPEDA Kota Banjar  | 4 Hari Kerja |
| 3. | bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi                               | Bagian TAPEM SETDA Kota Banjar BKPPD Kota Banjar               | 6 Hari Kerja |
| 4. | kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Bagian Hukum SETDA Kota Banjar                                 | 4 Hari Kerja |
| 5. | Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi  | Kantor PMPDKPOL Kota Banjar dan Bagian Hukum SETDA Kota Banjar | 4 Hari Kerja |

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes tata ruang antara lain :

| No | Persyaratan   | Hasil Pemeriksaan |       | Ket |
|----|---|-------------------|-------|-----|
|    |   | Ada               | Tidak |     |
| 1. | Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat. |                   |       |     |
| 2. | Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;  |                   |       |     |
| 3. | Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.   |                   |       |     |
| 4. | Peraturan desa tentang APB Desa tahun berkenaan.  |                   |       |     |
| 5. | Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang organisasi Pemerintah Desa.                |                   |       |     |
| 6. | Daftar hadir Peserta Musyawarah   |                   |       |     |

Tanggal Penerimaan .....

Tanggal Pemeriksaan .....

Pelaksana Evaluasi,

.....

NIP.

- b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
  3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
  4. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa, dalam APB Desa ada | Pada APBDes agar Penyusunan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang. |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Tanggal Pengembalian .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
  2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
  3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak ditetapkannya Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi   | Penyempurnaan  |
|----|--|--|
| 1. | Contoh : Raperdes masih terdapat jabatan Kepala Urusan Pemerintahan. | Agar Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. |
| 2. | Dst.....   |  |
| 3  | Dst.....   |  |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- d. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.
  3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

| No | Hasil Evaluasi  | Penyempurnaan  |
|----|---|--|
| 1. | Contoh : Raperdes organisasi Pemerintah Desa penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i> | Raperdes APB Desa agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i> |
| 2. | Dst.....  |  |
| 3  | Dst.....  |  |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

## E. HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Walikota menetapkan Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa dan atau Perubahan APB Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

## BAB III EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Walikota membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa. Tim tersebut melaksanakan klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota. Klarifikasi dilakukan terhadap semua Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Hasil klarifikasi berupa:

1. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
2. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila hasil klarifikasi Peraturan desa :

1. hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
2. Apabila hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Walikota.

Format hasil Klarifikasi telah sesuai sebagai berikut :

| No | Hasil Klarifikasi   | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1. | Contoh : Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. |            |
| 2. | Dst.....  |            |
| 3  | Dst.....  |            |

Kesimpulan :

1. Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar, sesuai hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang ..... , tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Atas hasil klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar tentang ..... agar diterbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

| No   | Hasil Klarifikasi   | Keterangan  |
|--|---|---|
| 1.   | Contoh : menurut hasil evaluasi Raperdes APB Des, pemerintah Desa untuk melaksanakan penyempurnaan Raperdes tentang APB Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi. Pada kenyataannya Pemerintah Desa mengundang Peraturan Desa tanpa melaksanakan penyempurnaan | Pemerintah desa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2.   | Dst.....  |   |
| 3  | Dst.....  |   |
| <p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar, sesuai hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang ..... , bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>2. Dst.....</li> </ol> <p>Rekomendasi:</p> <p>Atas hasil klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar tentang ..... agar di batalkan dengan Keputusan Walikota Banjar tentang Pembatalan Peraturan Desa ..... tentang .....</p> |   |   |

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Tanggal Pengembalian .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.